



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU		MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS		KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kasus TPP Rp 50 M Seluma Lanjut

Kejati Tunggu Surat Kemendagri dan Dirjen Keuangan

RBI, BENGKULU - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, Baginda Polin Lumban Gaol SH, MH melalui Aspidus Hendri Nainggolan SH, MH mengatakan, kasus dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten (Pekab) Seluma Tahun 2017 senilai Rp 50 Miliar itu, sekarang masih terus berlanjut. Namun pihaknya enggan membicarakan proses Penyelidikan itu lebih banyak. Sebab, sejauh ini pihaknya masih mau meminta surat kepada Biro hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen keuangan terkait dengan aturan TPP tersebut.

"Ya, untuk TPP Kabupaten Seluma sekarang kami belum bisa memberikan keterangan secara detil. Karena kasus itu, masih dalam Penyelidikan, dan Sekarang kita masih menunggu hasil koordinasi dengan pihak Kemendagri dan Dirjen Keuangan," ucapnya kemarin.

Kendati kasus TPP di Kabupaten Seluma ini masih dalam proses Penyelidikan, namun kasus tersebut sudah terbuka dan para awak media

mengetahui siapa saja yang sudah dimintai keterangan terkait dengan TPP Rp 50 Miliar ini.

"Untuk mengetahui apa yang dilanggar dalam aturan TPP ini tentu kita melihat aturan di Kemendagri dan system keuangan pada Dirjen keuangan terlebih dahulu. Apa yang dilanggar, dan apa yang harus dilakukan, nantilah kita lihat bagaimana akah ada yang menyalahi atau seperti apa. Yang jelas kasus ini tetap kita lanjutkan tunggu episode selanjutnya," pungkasnya.

Untuk diketahui, selama proses penyelidikan TPP Rp 50 Miliar tersebut, Kejati Bengkulu, sudah pernah memanggil beberapa pejabat di lingkup Pekab Seluma, yaitu Asisten I pada Pekab Seluma, Kabid pada DPPKAD Kabupaten Seluma, dan kabar yang teranyar Sekda Kabupaten Seluma itupun juga pernah dimintai keterangan terkait dengan kasus TPP tersebut. Dari anggaran TPP tembus Rp 50 Miliar yang dikucurkan untuk Pekab Seluma satu tahun itu diduga ada indikasi kerugian negara sekitar Rp 12 Miliar. (ide)